



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 100.3.8/430/Ro.Hukum-G.ST/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
100.3.8/259/RO.HUKUM-G.ST/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan dan penguatan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terstruktur, sistematis, terorganisir, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 33 Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur maka Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.3.8/259/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.8/259/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 796);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 100.3.8/259/RO.HUKUM-G.ST/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.8/Ro.Hukum-G.ST/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 100.3.8/RO.HUKUM-G.ST/2025 TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026

No.	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Perintah	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Ket.
				Baru	Ubah						
							NA	Penjelasan atau keterangan			
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10
1.	Raperda	Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Pejabat pengelola barang milik daerah - Perencanaan kebutuhan dan penganggaran - Pengadaan - Penggunaan	Baru		- PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah			1. BPKAD 2. Biro Hukum	Tahun 2026	

			- Pemanfaatan - Pengamanan dan pemeliharaan - Penilaian - Pemindahtanganan - Pemusnahan - Penghapusan - Penatausahaan - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian - Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah - Barang milik daerah berupa rumah negara - Ganti rugi dan sanksi								
2.	Raperda	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Objek baru dan perubahan tarif pada retribusi daerah - Perubahan tarif pada pajak daerah	Baru		- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			1. Bapenda 2. Perangkat Daerah terkait lainnya 3. Biro Hukum	Tahun 2026	

						- PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah					
3.	Raperda	Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah	- Pengelolaan Pendidikan - Penyelenggaraan pendidikan		Ubah	- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional			1. Dinas Pendidikan 2. Biro Hukum	Tahun 2026	
4.	Raperda	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan	- Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Pertambangan	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan			1. ESDM 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Dinas PM-PTSP 4. Biro Hukum	Tahun 2026	

						Usaha Pertambanga n Mineral dan Batu Bara - Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembanga n dan Pemberdayaa n Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambanga n Mineral dan Batu Bara					
5.	Raperda	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah	- Penambahan investasi berupa dana penyertaan modal Pemda Provinsi kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Sulawesi Tengah untuk penguatan modal dan pengembangan usaha	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah n Daerah - PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah			1. Biro Perekonomia n 2. Biro Hukum 3. BPKAD 4. Perusahaan Perseroan Daerah Pembanguna n Sulteng	Tahun 2026	

		Pembangunan Sulawesi Tengah				- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah					
6.	Raperda	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi	- Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi	Baru		- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah			1. Biro Organisasi 2. Biro Hukum	Tahun 2026	

						- Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID